DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id
www.dkpp.go.id medsosdkpp dkpp_ri @DKPP_RI DKPP RI Call Centre 1500101

RILIS DKPP

DKPP Berhentikan Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Sartua Tjarda Adil Yesyurun Situmorang, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi pemberhentian tetap itu dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk 12 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Sartua Tjarda Adil Yesyurun Situmorang selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis, Heddy Lugito, saat membacakan putusan perkara nomor 240-PKE-DKPP/X/2024.

Teradu terbukti melanggar prinsip mandiri, adil, dan profesional karena memberikan uang sejumlah Rp5.000.000, kepada pengadu, M. Yahya Saragih, yang menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Bangun Purba Tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif DPR Partai Nasdem Nomor Urut 5, Dapil Sumatera Utara, atas nama Edwin Pamimpin Situmorang.

Untuk tujuan yang sama, Sartua juga memberikan uang kepada Nova Yusniah Yanti selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Sibolangit Tahun 2024, sejumlah Rp7.000.000, serta kepada Lukas Lyeo Sibero selaku Ketua Panwaslu Kecamatan STM Hulu Tahun 2024, sejumlah Rp5.500.000.

“Teradu tidak hanya terbukti memberi uang kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga menyalahgunakan jabatan selaku penyelenggara pemilu untuk kepentingan atau berpihak pada peserta pemilu. Tindakan teradu jelas telah mencoreng marwah lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Deli Serdang,” ungkap Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Dengan demikian, teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, c, dan f, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 15 huruf a, d, dan g, dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pada sidang kali ini, DKPP membacakan putusan untuk 12 perkara yang melibatkan 51 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sanksi peringatan (13), peringatan keras (2), dan pemberhentian tetap (1). Terdapat 27 penyelenggara pemilu yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Dalam sidang yang sama, DKPP juga membacakan ketetapan untuk perkara nomor 310-PKE-DKPP/XII/2024 dan 102-PKE-DKPP/III/2025. Kedua perkara tersebut telah dicabut aduannya oleh pengadu sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan.

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis, didampingi Anggota Majelis antara lain J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA 4 AGUSTUS 2025

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	**240-PKE-DKPP/X/2024**	Sartua Tjarda Adil Yesyurun Situmorang **(Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)**	Pemberhetian Tetap
2.	**277-PKE-DKPP/XI/2024**	1. Taufik Hidayat 2. Vernando Maruli Aruan 3. Panataran Simanjuntak **(Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan)**	1. Peringatan 2. Peringatan 3. Peringatan
3.	**310-PKE-DKPP/XII/2024**	1. Iskandar 2. Darkasyi A. Hamid 3. Abdullah 4. Masrur 5. Hasmunir **(Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya)**	Ketetapan
4.	**13-PKE-DKPP/I/2025**	1. Lailatul Khoiriyah 2. Hendri Widiono 3. Syahroni 4. Cristine Bunga Ellora 5. Rizka Septia **(Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)**	1. Rehabilitasi 2. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi 4. Rehabilitasi 5. Rehabilitasi
5.	**15-PKE-DKPP/I/2025**	Dede Juhendi **(Anggota KPU Kota Bogor)**	Peringatan
6.	**80-PKE-DKPP/II/2025**	1. Frans J. Rumsarwir 2. Yohanis Kia Masan	1. Rehabilitasi 2. Rehabilitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		3. Rinto Pakpahan **(Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jayapura)** 4. Hardin Halidin 5. Haritje Latuihamallo 6. Amandus Situmorang 7. Yacob Paisei 8. Yofrey Piryamta N. Kebelen **(Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua)**	3. Rehabilitasi 4. Rehabilitasi 5. Rehabilitasi 6. Rehabilitasi 7. Rehabilitasi 8. Rehabilitasi
7.	**81-PKE-DKPP/II/2025**	1. Nolianus Kobogau 2. Johan Maiseni 3. Junus Miagoni 4. Penias Somau 5. Dami Zanambani **(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya)** 6. Etias Karoba **(Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya)**	1. Peringatan 2. Peringatan 3. Peringatan 4. Peringatan 5. Peringatan 6. Peringatan
8.	**84-PKE-DKPP/II/2025**	1. Nellyati 2. Ince Hadiy Rachmad 3. Zahlul Padil **(Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar)**	1. Rehabilitasi 2. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi
9.	**87-PKE-DKPP/II/2025**	1. Frans Wetipo 2. Yusuf Herru Sraun 3. Arfah 4. Diana Maria Dayme 5. Salahudin Renyaan **(Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika)**	1. Rehabilitasi 2. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi 4. Rehabilitasi 5. Rehabilitasi
10.	**94-PKE-DKPP/II/2025**	1. Frans Wetipo 2. Yusuf Herru Sraun 3. Arfah 4. Diana Maria Dayme 5. Salahudin Renyaan **(Ketua dan Anggota Bawaslu**	1. Peringatan Keras 2. Peringatan 3. Peringatan 4. Peringatan Keras 5. Peringatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		Kabupaten Mimika)	
11.	**95-PKE-DKPP/II/2025**	1. Dete Abugau 2. Hironimus Kia Ruma 3. Fransiskus Xaverius Ama Bebe Bahy 4. Budiono 5. Delince Somou **(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika)** 6. Wanesup Mauwama **(Ketua PPD Distrik Jita)**	1. Rehabilitasi 2. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi 4. Rehabilitasi 5. Rehabilitasi 6. Rehabilitasi
12.	**102-PKE-DKPP/III/2025**	1. Mathias Alubwaman 2. Sani Sarimane 3. Indra M. Pormes **(Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar)**	Ketetapan

Sekretaris DKPP,

Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).